



Hakcipta Dilindungi Undang-Undang

© Hakcipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI E-OFFICE PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

NURSAVINAH**12070523092**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2024 M/1445 H**



1. Dilarang menjiplak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nursavinah
Nim : 12070523092
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi e-Office Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**


Syed Agung Afandi, S. IP. M.IP
NIP. 19950618 202012 1 010

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
Administrasi Negara




Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M
NIP. 19700826 199903 2 001


Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nursavinah
Nim : 12070523092
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi e-Office Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau
Tanggal Ujian : 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Astuti Meflinda, SE, M.Si
 NIP. 19720513 200701 2 018

Penguji I
Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
 NIP. 19640508 199303 2 002

Penguji II
Mashuri, MA
 NIP. 19770721 201411 1 002

Sekretaris
Ermansyah, SE., MM
 NIP. 19850328 202321 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
- Dilarang menjiplak atau menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MURSAVINAH
 NIM : 12070523092
 Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Guntung, 29 November 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial (S1)
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Implementasi e-OFFICE Pada Kantor Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Pancitian dan Pengembangan Provinsi Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan

MURSAVINAH
 NIM : 12070523092

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

IMPLEMENTASI E-OFFICE PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU

Oleh:

NURSAVINAH
12070523092

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas jaringan akses informasi secara global, menciptakan aliran informasi yang tidak terbatas. Indonesia telah mengalami pergeseran menuju sistem negara yang lebih dikenal sebagai reformasi birokrasi. Reformasi ini mencakup rencana penerapan pemerintahan elektronik (*e-government*) di sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengimplementasian kebijakan program *E-Office* dalam mendukung *E-government* di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Penulis menggunakan Metode analisis deskriptif kualitatif dengan pengambilan data melalui Indept Interview, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Grindle. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-Office* guna mendukung langkah *E-government* di lingkungan kerja Bappedalitbang Provinsi Riau secara umum memberikan dampak yang positif bagi para pegawainya yaitu pada indikator *type of benefits* dengan adanya *e-office* ini mempermudah para pegawai dalam mengirim atau memeriksa naskah dinas yang sedang diperlukan. Namun, tidak bisa dipungkiri masih adanya indikator yang belum terlaksana dengan baik, yakni pada *Resources commited* ini dikarenakan masih adanya sarana prasarana yang masih belum optimal. Karena terdapat kekurangan yang signifikan dalam hal sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi *e-Office* seperti mesin pemindai (*scanner*) dan komputer PC, yang menghambat pelaksanaan *e-Office* secara efektif. Selain itu, pada indikator program implementators yakni masih adanya pegawai yang masih awam dengan perubahan teknologi meskipun sudah dilakukannya pelatihan dan pengenalan tentang *e-Office*.

Kata Kunci : Bappedalitbang Provinsi Riau, Implementasi, *e-government*, *e-office*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
The University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF E-OFFICE AT THE OFFICE OF THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT OF RIAU PROVINCE

By :

NURSAVINAH
12070523092

The development of information and communication technology has expanded the global information access network, creating an unlimited flow of information. Indonesia has experienced a shift towards a state system better known as bureaucratic reform. This reform includes plans to implement electronic government (e-government) in the public sector. This research aims to analyze the implementation of E-Office program policies in supporting E-government within the Riau Province government. The author uses a qualitative descriptive analysis method by collecting data through in-depth interviews, observation and documentation. The theory used is Grindle's theory of policy implementation. Based on the research results, it shows that the implementation of e-Office to support E-government measures in the Riau Province Bappedalitbang work environment generally has a positive impact on employees, namely on the type of benefits indicator. The presence of e-office makes it easier for employees to send or check manuscripts. services that are required. However, it cannot be denied that there are still indicators that have not been implemented well, namely the Resources Commitment because there are still infrastructure that is still not optimal. Because there is a significant shortage of facilities and infrastructure to support the implementation of e-Office, such as scanners and PC computers, which hinder the effective implementation of e-Office. Apart from that, the indicator for program implementers is that there are still employees who are unfamiliar with technological changes even though training and introduction to e-Office have been carried out.

Keywords: *Riau Province Bappedalitbang, Implementation, e-government, e-office*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI E-OFFICE PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU” dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yang senantiasa dirindukan wajahnya dan dinantikan syafa'atnya, Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliau kita semua mampu beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan dan peradaban seperti sekarang ini.

Skripsi ini di persembahkan untuk kedua orang tua penulis, Bapak Suryansyah dan Ibunda Siti Lamiyah yang begitu penulis cintai dan sayangi. Peran, cinta, do'a dan restu mereka sangat penulis syukuri hingga penulis bisa berada dititik ini. Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada keluarga besar sekandung dari penulis, Ratna Juita, Abdul Basid AMK, Hikmah AMK, Ahmad Fadlam S.I.Kom, Khairullah S.Kom, Dina Khairani S.Pd, serta keponakan yang senantiasa memberikan penulis nasehat dan semangat dan selalu mendengar segala keluh kesah penulis.

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini terlepas dari bimbingan, bantuan, serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E.,M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, M.A, selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Jhon Arrizal., M.A, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis
6. Bapak Syed Agung Afandi S.IP.,M.IP. selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini memimbing dengan sabar, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak/ibu Staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Khususnya untuk dosen program S1 Administrasi Negara yang telah memberi ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak Ir. Emri Juli Harnis, M.T., Ph.D. selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (Bappedalitbang) Porvinsi Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Bapak Purnama Irawansyah, S. Hut, MM., Selaku Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau.
10. Ibu Nurhayati, S.Pi. MSc., Selaku Kepala Bidang Subbagian Kepegawaian dan Umum Bappedalitbang Provinsi Riau.
11. Terimakasih kepada seluruh pegawai/staff Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau terkhusus pada kak Amy, kak Indah, kak winda, dan kak nita serta Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Bappedalitbang Prov. Riau yang telah banyak membantu serta membimbing penulis dalam skripsi ini.
12. Teman satu angkatan administrasi negara tahun 2020 terkhusus abiya pingkani Aurelia, Diffa Ardiningsih, Fatma hidayani putri, Linda Afriani, Mei-mei Oktaviana, Ria Dwi Safitri, Nur Indah Sari, Selvi Indah Permata Putry, Tiara Merselini. Terimakasih sudah menjadi rekan terbaik selama dibangku perkuliahan dan bersedia kebersamai penulis selama penulis menempuh pendidikan.
13. Terimakasih untuk Teman-teman seperjuangan lokal C angkatan 2020 Administrasi Negara yang telah memberikan motivasi dan menjadi contoh yang baik bagi penulis.
14. Terimakasih kepada abang-abang, kakak-kakak, teman-teman adik-adik seluruh keluarga Administrasi negara dan maaf tidak dapat menyebutkan nama satu persatu. Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama ini akan menjadi amal kebijakan dan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT.

Semoga segala dukungan, bantuan, dan partisipasi yang diberikan kepada penulis, mendapatkan berkah dan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin allahumma aamiin.





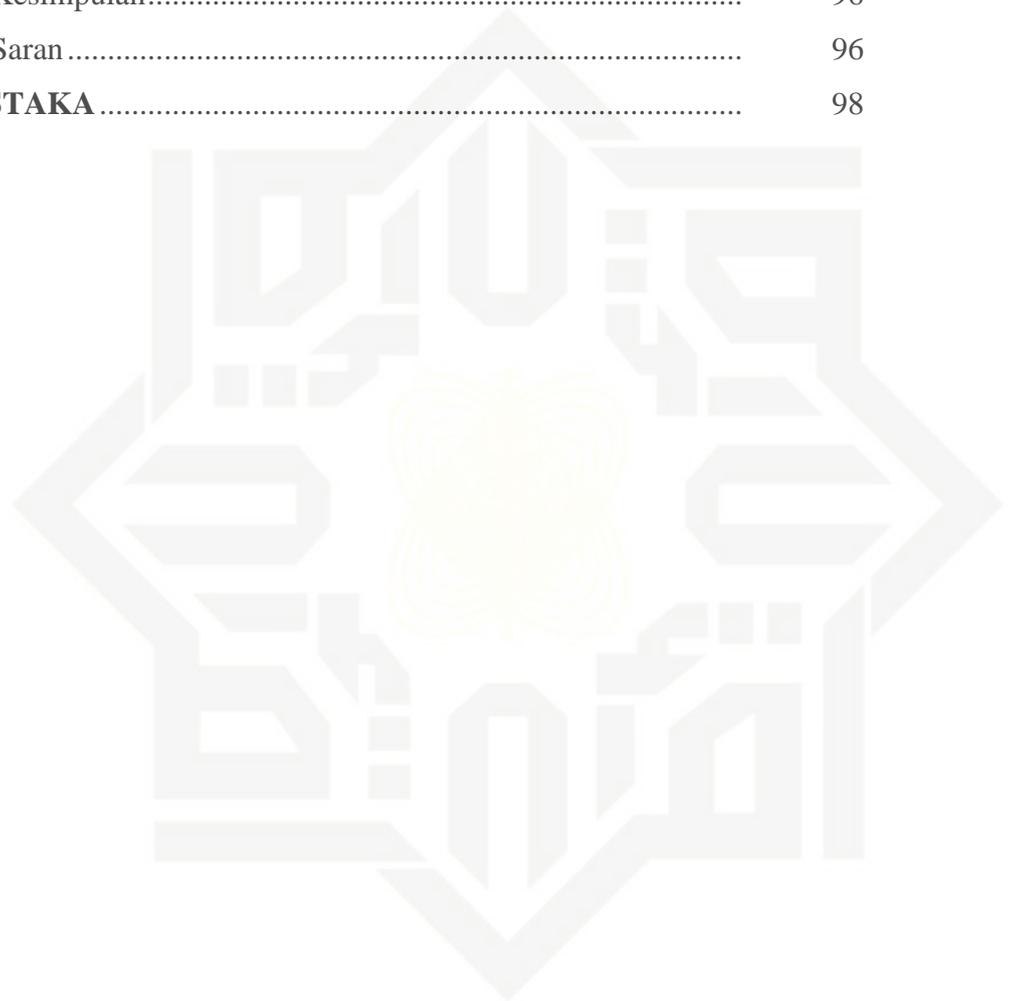
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	40
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
3.2	Jenis dan Sumber Data	40
3.2.1.	Data Primer	41
3.2.2	Data Sekunder	41
3.3	Metodei Pengumpulan Data	42
3.3.1	<i>Indept Interview</i>	42
3.3.2	Observasi.....	42
3.3.3	Dokumentasi	43
3.4	Informan Penelitian	44
3.5	Teknik Analisis Data	45
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
4.1	Sejarah Singkat Bappedalitbang Provinsi Riau.....	47
4.2	Visi dan Misi	48
4.2.1	Visi.....	48
4.2.2	Misi	49
4.3	Tugas dan Fungsi.....	49
4.4	Struktur Organisasi.....	51
4.5	Uraian Tugas (<i>Job description</i>) Bagian/ Unit Kerja.....	51
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	69
5.1	Isi Kebijakan (<i>The Content Of Policy</i>).....	70
5.1.1	Derajat Perubahan yang ingin dicapai atau (<i>Extent of changei envisioned</i>).....	70
5.1.2	Pelaksana Program atau (<i>Program Implementors</i>)	74
5.1.3	Sumber Daya Yang Digunakan atau (<i>Resources committed</i>).....	77
5.1.4	Tipe Manfaat (<i>Type Of Benefits</i>).....	82
5.2	Lingkungan Implementasi (<i>Context Of Implementasition</i>) .	85
5.2.1	Kepentingan Yang Terpengaruhi atau (<i>Interests affected</i>).....	85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2.2 Karakteristik Pimpinan atau (<i>Institution and regime characteristic</i>).....	88
5.2.3 Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana (<i>Compliance and responsiveness</i>).....	91
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	96
6.1 Kesimpulan.....	96
6.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Riau.....	3
Tabel 1.2	Daftar OPD yang telah mengikuti pelatihan dan menggunakan <i>e-office</i>	5
Tabel 1.3	Administrasi Perkantoran Pada Bappedalitbang Provinsi Riau.....	7
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai di Bappedalitbang Provinsi Riau	8
Tabel 1.5	Mentoring dalam Pelatihan Penggunaan Sistem <i>e-Office</i> di Lingkungan Bappedalitbang Provinsi Riau	9
Tabel 2.1	Peneliti Terdahulu.....	33
Tabel 2.2	Konsep Operasional.....	38
Tabel 3.1	Daftar Informan Penelitian	44
Tabel 5.1	Pegawai Negeri Sipil Bappedalitbang Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023.....	79
Tabel 5.2	Perangkat Pendukung Pada Dinas Bappedalitbang Provinsi Riau.....	81

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir (Sumber Penulis 2023).....	39
Gambar 4.1	Bagan Struktur Bappedalitbang Provinsi Riau.....	51
Gambar 5.1	Tampilan Aplikasi e-Office pada Bappedalitbang Provinsi Riau.....	73
Gambar 5.2	Tampilan Server Down Pada e-Office	77
Gambar 5.3	Tampilan Surat masuk.....	84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas jaringan akses informasi secara global, menciptakan aliran informasi yang tidak terbatas. Hal ini dapat mengubah kebiasaan cara melakukan berbagai kegiatan termasuk dalam menyelenggarakan kegiatan bernegara. Adanya sistem informasi dan komunikasi yang mempengaruhi kinerja para pegawai secara efektif dan efisien untuk menjalankan tugasnya di lingkungan lembaga pemerintah (Oktaviana, 2018). Dalam rangka menjalankan tugasnya untuk mengembangkan penerapan teknologi ini di lingkungan instansi pemerintah, langkah pertamanya adalah “*elektronik government*” atau bisa disebut “*e-government*”, yaitu sistem pemerintah berbasis internet.

Pemerintahan berupaya menerapkan teknologi informasi, untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja dalam pelayanan public untuk mengikuti perkembangan zaman, termasuk globalisasi. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi salah satu respons terhadap kebutuhan akan tren global. Dimana Smart ASN yang memiliki karakter, kompetensi dan kinerja yang unggul serta mampu memanfaatkan TIK untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia, sehingga smart ASN mampu menggunakan aplikasi untuk menyelesaikan tugas administrative, mampu menganalisis data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, mampu berkomunikasi dengan pegawai lain secara online, mampu berinovasi dengan menggunakan TIK untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia telah mengalami pergeseran menuju sistem negara yang lebih dikenal sebagai reformasi birokrasi. Reformasi ini mencakup rencana penerapan pemerintahan elektronik (*e-government*) di sektor publik. Melalui INPRES nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang efisien, terbuka, dan kompeten untuk secara efektif menanggapi perubahan kebutuhan rakyat. Hal itu kemudian menyusul diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik transaksi dan tanda tangan elektronik sebagai langkah konkret dalam mendukung implementasi *e-government*.

Dalam *E-government* dikenal sebuah *software* untuk mendukung kegiatan pengadministrasian dengan nama *e-perkantoran (e-office)*. *Electronic Office (e-office)* merupakan salah satu program perangkat lunak yang digunakan dalam *e-Government* untuk mendukung tugas administrasi dalam mengelola dokumen dan komunikasi di instansi pemerintah. Menurut Subari dalam (Narsein & Sugiarto, 2022), *e-office* adalah dirancang untuk mencakup semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi berbasis komputer untuk operasional perkantoran. Hal ini menggambarkan bagaimana seluruh tugas administrasi perkantoran pada *e-Office* diselesaikan secara elektronik dengan penggunaan alat komunikasi dan sistem informasi *e-Office*, yang menggantikan proses administrasi manual (*paper-based*) dengan proses elektronik (*paperless*) dengan menggunakan fasilitas jaringan yang bersifat jaringan internet online dan jaringan lokal (*LAN*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perangkat daerah merujuk kepada unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang berada dibawah kewenangan daerah. Pembentukan dan struktur perangkat daerah diatur melalui peraturan daerah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016. Berikut Daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Provinsi Riau :

Tabel 1.1 Daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Riau

NO	OPD	NO	OPD
1	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Biro Administrasi Pimpinan	24.	Dinas Kesehatan
3	Biro Hukum	25	Biro Organisasi
4	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	26	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
5	Biro Umum	27	Dinas Pariwisata
6	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	28	Dinas Pendidikan
7	Badan Kepegawaian Daerah	29	Dinas Sosial
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30	Dinas Perhubungan
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	32	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Badan Pendapatan Daerah	34	Inspektorat
13	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	Dinas Kebudayaan	37	RSUD Arifin Achmad
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	38	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
17	Satuan Polisi Pamong Praja	39	Badan Penghubung
18	Biro Administrasi Pembangunan	40	Biro Perekonomian
19	Dinas Pertenakan dan Kesehatan	41	Dinas Kelautan dan Perikanan

	Hewan		
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	42	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
21	RSUD Pelita Bumi	43	RSJ Tampan
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

Sumber: Diskominfotik Provinsi Riau, 2023

Melalui surat Edaran Gubernur Pemerintah Provinsi Riau Nomor 555/Diskominfo&PDE/90.21 tentang pelaksanaan *e-Government* di lingkungan Pemprov Riau pada bulan November 2014, mengintruksikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk menerapkan aplikasi *e-Office* sebagai sistem pendistribusian surat menyurat perkantoran yang sudah diberi pelatihan.

Penerapan *e-Office* ini dasar penggunaannya diperkuat dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Perkantoran secara Elektronik (*e-Office*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dapat dilihat pada pasal 2 ayat 1 yaitu “Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus menggunakan aplikasi perkantoran secara elektronik (*e-Office*) dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran”. Berikut Daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mengikuti pelatihan dan menggunakan *e-office* di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Daftar OPD yang telah mengikuti pelatihan dan menggunakan e-office.

NO	OPD	NO	OPD
1	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	18	Dinas Kesehatan
2	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Biro Administrasi Pimpinan	20	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	Biro Hukum	21	Dinas Pariwisata
5	Biro Organisasi	22	Dinas Pendidikan
6	Biro Umum	23	Dinas Sosial
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
8	Badan Pendapatan Daerah	25	Badan Kepegawaian Daerah
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pebelitian dan Pengembangan	28	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12	Inspektorat	29	Dinas Perhubungan
13	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
14	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	Badan Penghubung	33	Dinas Kebudayaan
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	34	RSUD Arifin Achmad

Sumber: Diskominfotik Provinsi Riau, 2023

Namun masih beberapa OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang belum sama sekali menggunakan e-Office yaitu : 1) Biro Administrasi Pembangunan, 2) Biro Perekonomian, 3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 4) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Berencana, 6) Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan, 7) RSJ Tampan, 8) RSUD Pelita Bumi, dan 9) Satuan Polisi Pamong Praja

Dapat dilihat dari semua tabel diatas, terlihat dengan jelas bahwa masih terdapat 5% dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang belum menggunakan *e-Office*. Meskipun 95% dari total OPD di Provinsi Riau telah menggunakan sistem informasi *e-Office*, namun belum sepenuhnya menerapkan *e-Office* di dalam instansi tersebut. Berdasarkan tabel tersebut, program pelatihan *e-Office* diikuti dan dilaksanakan oleh masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, salah satunya adalah Bappedalitbang Provinsi Riau yang telah menggunakan *e-Office* untuk mendistribusikan surat menyurat. Sebagaimana diketahui, dinas ini telah mengikuti pelatihan *e-Office* dan seluruh staf dinas juga sudah menggunakan *e-Office*. Dengan adanya aplikasi *e-Office* pada Bappedalitbang Provinsi Riau dapat mempermudah melihat surat yang diterima, melacak surat masuk maupun surat keluar selain itu juga membantu tugas tenaga pegawai (SDM) yang bertugas sebagai menyampaikan surat agar bisa sampai ke tujuannya dengan cepat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan pengelolaan *e-Office*. Selain itu, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau di wakili tenaga IT yang ditugaskan sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan khusus pegawai yang ada di Bappedalitbang Provinsi Riau. Hingga saat ini, Bappedalitbang Provinsi Riau sudah menggunakan *e-Office*. Pemanfaatan TI dalam mendukung kegiatan kantor belum bisa dilakukan secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

maksimal karena terkendala jaringan, server *e-Office*, dan keterbatasan seperti kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam TIK, serta masalah teknis dan sosial dalam pelaksanaan *e-Office*. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi dalam mengimplementasikan penggunaan *e-Office* pada OPD di Bappedalitbang Provinsi Riau untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari penggunaan *e-Office* tersebut, serta untuk menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi *e-Office*. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Administrasi Perkantoran Pada Bappedalitbang Provinsi Riau

No	Administrasi Perkantoran	Secara Manual	Secara Elektronik (<i>EI_Office</i>)
1.	Keputusan Kepala SKPD	-	√
2.	Surat Edaran	√	√
3.	Surat Biasa	√	√
4.	Surat Keterangan	√	√
5.	Surat Perintah	-	√
6.	Surat Izin	√	√
7.	Surat Perjanjian	-	√
8.	Surat Perintah Tugas (SPT)	√	√
9.	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)	-	√
10.	Surat Undangan	-	√
11.	Nota Dinas	√	√
12.	Telaah Staf	-	√
13.	Pengumuman	-	√
14.	Berita Acara	-	√
15.	Surat Masuk	-	√
16.	Surat Keluar	-	√
Jumlah		6	10

Sumber : Dinas Bappedalitbang Provinsi Riau 2023

Dari Fenomena yang peneliti temukan surat edaran, surat biasa, surat keterangan, surat izin, surat perintah tugas, dan nota dinas sudah melalui *e-Office* namun juga masih ada yang di disposisikan secara manual dengan menggunakan kertas, biasanya secara kondisional jika pimpinan sedang berada di dinas luar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi karena semua yang ada di *e-Office* sudah tersistematisasi, maka jika diproses melalui *e-Office* penerapannya tidak bisa tertunda atau diberlakukan surut.

Bappedalitbang memiliki sebuah unit khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola administrasi pegawai yang terkait dengan penggunaan sistem informasi, seperti *e-Office*. Unit tersebut merupakan bagian dari sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab terkait dengan kebutuhan administratif pegawai dilingkungan Bappedalitbang Provinsi Riau. Fungsi dari unit SDM ini mencakup pengaturan dan penyediaan layanan untuk pegawai baik internal maupun eksternal. Jumlah pegawai di Bappedalitbang Provinsi Riau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 210 pegawai, sedangkan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 76 pegawai. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai di Bappedalitbang Provinsi Riau

No	Pegawai	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	210
2	Tenaga Harian Lepas (THL)	76

Sumber : Dinas Bappedalitbang Provinsi Riau 2023

Dalam penggunaan aplikasi pada sistem informasi yang canggih, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kehandalan SDM, yang diharapkan mampu mengelola sistem informasi dan menggunakan aplikasi dengan keterampilan dan ketepatan. SDM harus didukung dengan memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai, khususnya yang terlibat langsung dalam pengoperasian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem komputer. Karena jika pelatihan tidak diberikan maka proses kerja akan terhambat dan menimbulkan masalah karena pengguna atau pegawai tidak memahami cara mengoperasikan suatu sistem atau program, sehingga mengakibatkan kinerja sistem informasi tidak maksimal seperti yang diharapkan. Pegawai perlu diberikan banyak pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka di bidang baru, terutama dalam hal penggunaan teknologi canggih seperti penggunaan aplikasi *e-office* yang dijalankan oleh pelaksana SDM. Oleh karena itu, pendampingan pelatihan yang telah dilaksanakan Bappedalitbang dapat dilihat pada tabel 1.5 :

Tabel 1.5 Pendampingan Mentoring dalam Pelatihan Penggunaan Sistem *e-Office* di Lingkungan Bappedalitbang Provinsi Riau

BIDANG	JUMLAH
Sekretariat	10 Orang
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	3 Orang
Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	2 Orang
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	3 Orang
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Orang
Bidang Penelitian dan Pengembangan	2 Orang
Jumlah	22 Orang

Sumber : Dinas Bappedalitbang Provinsi Riau 2023

Tabel 1.5. menunjukkan pelatihan yang telah diterima oleh pegawai Bappedalitbang selama kurang waktu 3 Tahun (2021-2023) hanya mendapatkan satu kali pelatihan pada 16 April 2021 dengan seluruh pegawai yang dikirimkan untuk mengikuti pelatihan tentang penggunaan *e-office*. Namun, hanya 22 orang yang akan ditetapkan sebagai pendampingan. Dimana mereka memberikan bantuan dan dukungan kepada rekan-rekan kerja selama proses implementasi *e-office*. Masing-masing pegawai berasal dari unit yang berbeda. Pelatihan tersebut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan di kantor Bappedalitbang. Tabel diatas menunjukkan bahwa pelatihan yang telah diberikan oleh dinas Bappedalitbang bersifat belum merata dan tidak cukup untuk dikatakan efektif karena pelatihan yang diberikan hanya satu kali dalam kurung waktu 3 (Tiga) tahun setelah pelaksanaan penggunaan aplikasi *e-Office*.

Bappedalitbang Provinsi Riau sejauh ini telah berupaya untuk mengaktifkan teknologi *e-Office* untuk semua aspek administrasi perkantoran. Selain itu dalam menerapkan *e-Office* di Bappedalitbang Provinsi Riau dibutuhkan beberapa perlengkapan untuk mendukung implementasinya. Beberapa perlengkapan yang perlu di sediakan untuk menunjang penerapan *e-Office*. Antara lain : (PC Desktop, Komputer PC, Mesin Printer, Mesin Scanner, Hardisk Eksternal) Dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia, maka akan mempermudah dalam proses pelaksanaan. Hal ini dapat diperhatikan bahwa pada dinas Bappedalitbang Provinsi Riau telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang dalam pengoperasian aplikasi *e-Office*. Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh unit SDM untuk mengoperasikan aplikasi *e-Office* masih belum memadai. Secara khusus, terdapat kekurangan dalam jumlah mesin pemindah (*scan*), yang digunakan untuk mentransfer berkas atau dokumen ke dalam komputer. Keterbatasan ini menyebabkan pegawai di unit SDM harus berbagi penggunaan mesin tersebut secara bergantian untuk mengunggah berkas atau dokumen yang dibutuhkan ke dalam server komputer. Keadaan ini dapat mengakibatkan perlambatan dalam pemrosesan data, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi tidak tepat waktu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa Bappedalitbang Provinsi Riau telah mengimplementasikan administrasi perkantoran menggunakan *e-Office*. Meskipun demikian, penerapan *e-Office* ini belum mencapai tingkat optimal karena sebagian pegawai belum memiliki kemampuan penuh dalam menggunakan *e-Office*. Kurangnya keahlian tersebut mengakibatkan kurangnya minat dari pegawai untuk menggunakan *e-Office*, sehingga sebagian administrasi surat menyurat masih menggunakan sistem manual dengan pengantaran langsung kepada pihak yang dituju. Hal ini berdampak pada kinerja pegawai dan seringkali menyebabkan kegagalan dalam pemanfaatan sistem informasi. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam keahlian pegawai, yang dapat menjadi faktor utama dalam kegagalan pemanfaatan sistem informasi. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, diharapkan penerapan *e-Office* dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi.

Dalam uraian latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini yang dapat penulis ambil yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya, yaitu sumber daya aparatur atau pegawai pada Bappedalitbang Provinsi Riau baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam menggunakan Sistem Informasi *e-Office* dan masih terdapat pegawai yang tidak optimal dalam pemanfaatan *e-Office* dan tidak semua pegawai juga memiliki keterampilan teknologi yang memadai atau pemahaman yang cukup mendalam terkait penggunaan *e-Office*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Masih ada terlihat sebagian sarana yang belum maksimal penggunaannya dalam memanfaatkan *e-Office*.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji masalah tentang penerapan *e-Office* tersebut lebih dalam lagi di Bappedalitbang Provinsi Riau dengan mengangkat judul “Implementasi *e-Office* Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan fenomena yang diamati, penulis merumuskan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi *e-Office* Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini hakekatnya mempunyai tujuan tertentu dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi *e-Office* Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut :

1. Akademis

Secara akademis, diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi yang berharga bagi para sarjana, peneliti, serta pihak-pihak lain yang tertarik atau terlibat dalam bidang studi yang sama. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memicu lebih banyak lagi penelitian lanjutan yang dapat mengembangkan pemahaman kita terhadap masalah yang diidentifikasi.

2. Praktis

Secara praktis, diharapkan temuan studi ini dapat menjadi panduan dan pertimbangan praktis, terutama bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau. Temuan ini diharapkan dapat memberikan arahan konkrit dalam upaya meningkatkan kinerja aparaturnya, dengan memberikan wawasan mengenai perbaikan sumber daya manusia, peningkatan keterampilan teknologi, dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi *e-Office* dalam konteks layanan administrasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut agar penulisan ini lebih tertata dan terarah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana peneliti menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

: KAJIAN TEORI

Pada bab ini peneliti mengemukakan landasan teori yang berhubungan dengan sistematika penulisan.

BAB III

: METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan mengemukakan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, subjek penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada BAB IV dalam penelitian ini memuat informasi mengenai lokasi penelitian dan struktur organisasi dari lokasi penelitian.

BAB V

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB V akan menguraikan hasil dan pembahasan mengenai permasalahan penelitian

BAB VI

: PENUTUP

Pada BAB VI memuat informasi kesimpulan dan saran dari permasalahan penelitian



BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Secara garis besar adalah suatu sistem pilihan atau serangkaian tindakan yang memberikan pedoman, konsistensi, dan kesinambungan. Menurut Dye, T. R. (2013), mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai *“is whatever governments choose to do or not to do”*. Dikemukakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya, dan kebijakan itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pemerintah semata. Menurut Winarno, 2002 (dalam Herdiana, D. 2018) Mengemukakan bahwa istilah “kebijakan” atau *“policy”* secara umum sering digunakan untuk menggambarkan perilaku seorang aktor atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. sedangkan definisi kebijakan Menurut Iskandar 2012 (dalam Herdiana, D. 2018) Kebijakan dapat didefinisikan sebagai rangkaian rencana, program, aktivitas, keputusan, dan sikap yang diadopsi oleh para pihak atau aktor kebijakan. Ini mencakup tindakan atau ketidakberlanjutan yang diambil sebagai langkah-langkah menuju penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan (*policy*) merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, tindakan pemerintah untuk merespons atau tidak merespons permasalahan yang ada juga termasuk dalam bentuk kebijakan publik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat sehingga sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam rangkaian proses kebijakan yang terjadi setelah pengesahan Undang-Undang. Implementasi kebijakan mencakup segala hal yang terjadi setelah penetapan Undang-Undang, memberikan wewenang terhadap program, kebijakan manfaat, atau hasil konkret yang di dapat (Firmansyah, M. F., Gantini, V. A., & Tistari, D. D. 2022). Dalam praktiknya, implementasi kebijakan menjadi suatu proses yang rumit, bahkan seringkali memiliki dimensi politis karena melibatkan intervensi atas berbagai kepentingan (Agustino leo 2016).

Menurut Aneta, A. (2012) Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu langkah dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah suatu kebijakan sejalan dengan kepentingan publik dan dapat didukung oleh masyarakat umum. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa meskipun tahapan perencanaan dan perumusan kebijakan dapat diselesaikan dengan kemampuan terbaiknya, namun tidak jelas apa yang diharapkan dari suatu produk kebijakan jika optimalisasi diabaikan pada tahap implementasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa factor, termasuk pertimbangan dari para pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi tinggi dari para pelaksana kebijakan, serta perilaku sasaran kebijakan. Secara konseptual, implementasi kebijakan dapat dianggap sebagai suatu proses pengalihan sumber daya alam, manusia dan finansial yang diikuti



dengan penentuan tindakan-tindakan yang perlu diambil guna mencapai tujuan kebijakan.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan (Georgei Edward III, 1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang penting karena jika suatu kebijakan tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dalam implementasinya, maka tujuan dari kebijakan publik tidak akan tercapai. Sebaliknya, meskipun persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan dilakukan secara baik, jika kebijakan itu sendiri tidak dirumuskan dengan baik, tujuan kebijakan juga tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kebijakan, baik perumusan kebijakan maupun implementasi harus disiapkan dan direncanakan dengan baik. Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011:90-92 dalam (Leyn, 2019)) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu : (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling berhubungan dan saling memengaruhi dalam proses implementasi kebijakan.

Menurut Grindle, Merilee S (1980) model implementasi dapat dianggap sebagai suatu proses yang melibatkan unsur politik dan administrasi Model ini menggambarkan bagaimana keputusan diambil oleh berbagai aktor, dan hasil akhirnya ditentukan oleh pencapaian materi program dan interaksi antara pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik tampak melalui pengambilan keputusan yang melibatkan aktor kebijakan, sementara proses administrasi tampak melalui tindakan administratif yang dapat diamati pada tingkat program tertentu. Dalam hal ini, Grindle menyatakan bahwa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan dalam mencapai hasil (*outcomes*) sangat dipengaruhi oleh desain kegiatan program yang telah dibuat dan ketersediaan pembiayaan yang memadai. Dengan kata lain, efektivitas implementasi kebijakan terkait erat dengan sejauh mana program telah direncanakan dengan baik dan mendapatkan dukungan finansial yang memadai.

Dalam temuan Grindle, Merilee S faktor-faktor Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu : isi kebijakan (*content of policy*) mengacu pada karakteristik dan substansi dari kebijakan itu sendiri Sedangkan lingkungan implementasi (*context of implementation*) mengacu pada kondisi dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

a) *content of policy* Menurut Grindle adalah :

1. *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan) Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

2. *Program Implementors* atau para pelaksana implementasi program; Pelaksana program Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
3. *Resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan) Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
4. *Type of benefits* (tipe manfaat) atau jenis manfaat yang diterima oleh target groups. Pada poin ini Content of Policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

b) *Context of implementation* Menurut Grindle adalah :

1. *Interests affected* atau kepentingan yang terpengaruhi; Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini berargumen bahwa suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya

2. *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan penguasa) Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
3. *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) artinya tingkat kepatuhan responsivitas kelompok sasaran dengan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Berdasarkan deskripsi ini membuat semakin jelas bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Oleh karena itu, untuk mencapai kesuksesan dalam implementasi kebijakan publik, perlu tindakan yang hati-hati, konsisten, dan penuh tanggung jawab terhadap penanganan kedua faktor tersebut.

2.3 *e-Government*

Sejak dimulainya era reformasi di Indonesia, terjadi transformasi menyeluruh dalam kegiatan pemerintahan yang dikenal dengan sebutan reformasi birokrasi. Salah satu inisiatif dalam program reformasi ini adalah implementasi pemerintahan elektronik (*e-government*) di lingkungan kantor pemerintah.

2.3.1 Definisi *E-government*

Electronic Government atau *E-government* merupakan garda terdepan dari upaya pemerintah dalam menyediakan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, kelompok bisnis, pegawai pemerintah, dan organisasi masyarakat (Yu-Che Chen & James Perry, 2003). Sedangkan Menurut Irawan, B. (2017) *E-Government* juga diartikan sebagai suatu metode yang digunakan oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi baru dalam memberikan layanan informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan cara yang efisien. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi demokratis.

Menurut Gusman, D. T. (2023) *e-Government* mencakup kegiatan pemerintahan yang memanfaatkan media teknologi dan informasi untuk

menyediakan informasi dan pelayanan kepada warganya, serta aspek-aspek lain yang terkait dengan pemerintahan. *World Bank* memberikan definisi yang lebih komprehensif, menyatakan bahwa *e-Government* melibatkan penggunaan teknologi informasi, seperti jaringan luas, internet, dan komunikasi bergerak, oleh lembaga pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk mentransformasikan hubungan antara pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya.

Dari beberapa definisi tentang *e-Government* diatas secara umum, dapat disimpulkan bahwa *e-Government* adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi terkini oleh pemerintah untuk menyediakan layanan yang intensif kepada masyarakat, pelaku bisnis, dan lingkungan pemerintah. Hal ini dilakukan melalui aplikasi berbasis web dengan melakukan perubahan pada proses internal dan eksternal. Tujuan utama dari implementasi *e-Government* adalah mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, memberikan kemudahan yang semakin bertambah, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi biaya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Choiriyah, I. U. (2020) berpendapat bahwa pengembangan *e-Government* di Indonesia dapat diwujudkan dengan berbagai metode, di antaranya adalah melaksanakan proses pengembangan secara terencana dengan tahap-tahap yang realistis dan dapat diukur. Strategi tersebut dilakukan melalui empat tahapan diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tingkat persiapan : pembuatan situs informasi di setiap lembaga, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana akses yang mudah seperti *multipurpose community center* dan warnet, serta pelaksanaan sosialisasi situs informasi, baik secara internal maupun eksternal.
- b. Tingkat pematangan : meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif dan pembuatan antarmuka keterhubungan antar lembaga lain.
- c. Tingkat pematapan : mencakup pembuatan situs untuk transaksi layanan publik dan pengembangan interoperabilitas aplikasi serta data dengan lembaga lain.
- d. Tingkat pemanfaatan : meliputi pembuatan aplikasi pelayanan yang bersifat G2G (*Government To Government*), G2B (*Government To Business*) dan G2C (*Government To Citizen*) yang terintegrasi.

Menurut indrajit dalam Irawan, A. (2018) manfaat yang diperoleh dengan diterapkan konsep *e-Government* bagi suatu Negara, yakni:

1. Meningkatkan standar pelayanan pemerintah kepada para pemangku kepentingan atau *stokeholder* (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) khususnya yang berkaitan dengan kinerja efektivitas dan efisien mereka dalam menjalankan berbagai fungsinya dinegara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Meningkatkan akuntabilitas, keterbukaan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka menerapkan konsep *good governance*.
3. Menurunkan secara signifikan keseluruhan biaya administrasi, relas dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholdernya* untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
4. Membangun hubungan yang lebih kuat antara masyarakat dan partai politik yang bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang inklusif dan demokratis.

Tipe-tipe relasi *e-Government* menurut Indrajit (2006:4) dalam Oktavya,

A. A. (2015) adalah sebagai berikut :

- a. *Government to citizen/governmentto customer (G2C)*

Aplikasi *e-Government* Tipe G-to-C adalah yang paling populer, di mana pemerintah menciptakan dan mengimplementasikan banyak portofolio TI dengan tujuan utama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, tujuan utama pengembangan aplikasi *e-Government* versi *G-to-C* adalah untuk membangun lebih banyak titik akses antar pemerintah dan masyarakat, sehingga memungkinkan pemerintah untuk berkomunikasi secara cepat dengan pemerintah guna memenuhi berbagai kebutuhan layanan sehari-hari.

- b. *Government to Business (G2B)*

Transaksi Government to Business termasuk pemerintah mengirimkan beberapa informasi yang dibutuhkan bisnis untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertransaksi dengan pemerintah secara elektronik. Menghasilkan iklan produk dan layanan yang ditunjukkan kepada pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan data elektronik dan efektivitas operasional. Aplikasi *E-Procurement* memudahkan interaksi G2B dan B2G.

c. *Government to Government (G2G)*

Melalui basis data terintegrasi, kontak pemerintah ke pemerintah dan berbagi informasi dimungkinkan antara departemen atau lembaga pemerintah. Beberapa contohnya adalah konsultasi online, blog pembuat undang-undang, pendidikan online, dan layanan masyarakat terpadu.

d. *Government to employees (G2E)*

Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pegawai pemerintah yang memberikan pelayanan masyarakat dalam berbagai situasi. Ilustrasi program asuransi kesehatan dan pendidikan pegawai negeri yang telah terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, apotek, politeknik, dll) dan fasilitas pendidikan (perguruan tinggi, SMA, SMK, dll).

2.4 *E-office*

Sistem yang terkait dengan administrasi yang disebut *Electronic Officei* (*e-Office*) pada dasarnya memusatkan bagian-bagian sebuah organisasi dimana data, informasi, dan komunikasi dihasilkan dengan menggunakan media telekomunikasi.



2.4.1 Definisi *Electronic Office (e-Office)*

Electronic Office atau *e-Office* merupakan “software” yang digunakan untuk mengatur pola pekerjaan yang sudah atau akan dilakukan oleh pegawai, menyimpan dan mengontrol konten-konten yang ada pada suatu organisasi secara elektronik (Nasution & Malikhah, 2020). *Electronic Office* juga dikenal sebagai *e-Office*, telah ada sejak lama. Konsep ini diintegrasikan ke dalam idei (*Internet of Things*), yang berlaku untuk semua bidang. Tempat kerja berbasis elektronik, atau lebih tepatnya kantor virtual, merupakan yang dimaksud (Nala, 2021). Istilah “*e-Office*” menggambarkan aktivitas kerja yang memanfaatkan jaringan internet dan gadget teknologi. Tujuan penggunaan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas kantor di berbagai bidang seperti pencatatan, mengumpulkan data, mengolah data, menyimpan data, serta komunikasi, surat menyurat, dan pengarsipan. (Mannanetal., 2018; Dalam Anam, C. 2023).

Electronic Office menurut Subari dalam (Narsen & Sugiarto, 2022), adalah dirancang untuk mencakup semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi berbasis komputer untuk operasional perkantoran. *Electronic Office (e-Office)* merupakan salah satu program perangkat lunak yang digunakan dalam *e-Government* untuk mendukung tugas administrasi dalam mengelola manajemen virtual dan memusatkan komponen organisasi. Dalam konteks ini, alat yang digunakan untuk menghasilkan data yang akurat diperoleh melalui media komunikasi (Mulyono, 2018).

Tujuan dari Sistem *E-Office* ini adalah untuk memfasilitasi instansi dan memudahkan perkantoran dalam pengelolaan dokumen surat menyurat dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas perkantoran secara online. Dan tujuannya sebagai berikut (Indonesia, 2021):

1. Memudahkan pengelolaan surat masuk dan surat keluar secara elektronik.
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pelayanan publik dan persuratan.
3. Mempercepat pengelolaan Dokumen Dinas secara Elektronik.
4. Mewujudkan birokrasi modern yang efektif dan efisien di Instansi Pemerintah.
5. Tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan naskah dinas.
6. Mencegah duplikasi, kesalahpahaman, dan pemborosan dalam pelaksanaan proses dokumen resmi.
7. Terselenggaranya pengelolaan naskah dinas secara terpadu dengan komponen tambahan yang termasuk dalam lingkup administrasi umum.
8. Terwujudnya birokrasi modern yang efektif dan efisien di instansi pemerintah daerah / SKPD.

2.4.2 Sistem Kerja *e-Office*

Sistem operasi *e-Office* menggambarkan cara kerja *e-Office* melalui lima segmen yang berbeda yaitu (Indonesia, 2021):

1. *Input* : Proses input terdiri dari tiga kategori, yaitu data audio, visual, dan audiovisual. Media yang digunakan meliputi surat elektronik dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

informasi online. Selain itu, perangkat keras seperti *scanner* juga digunakan untuk memasukkan data.

2. *Proses* : Melibatkan pengolahan Sumber informasi yang telah dimasukkan melalui input. kemudian akan diolah melalui aplikasi yang terdapat di dalam computer.
3. *Storage* : Setelah data diolah, hasilnya akan disimpan dalam penyimpanan virtual untuk mencegah kehilangan dan memungkinkan penggunaan ulang di kemudian hari.
4. *Output* : Setelah data diolah dan disimpan, langkah selanjutnya adalah output. Output dapat berupa *hardcopy*, seperti cetakan kertas, dan *softcopy*, yang dapat ditampilkan atau disimpan dalam bentuk digital.
5. *Distribution* : Data melewati proses *output*, data yang telah dihasilkan didistribusikan keseluruh pengguna *e-Office* untuk dapat di akses dan digunakan.

2.4.3 Penggunaan e-Office.

Penggunaan *e-Office* terdiri dari empat jenis yaitu (Indonesia, 2021):

1. *Administrator*

Bertanggung jawab untuk mengelola data anggota, Memiliki akses untuk mengakses dan mengelola penggunaan lain dalam sistem *e-Office*.

2. *Operator*

Memiliki kemampuan untuk mengirim surat melalui platform *e-Office*, bisa mengeksekusi skrip surat, dan menerima disposisi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Pejabat pimpinan/atasan.*

Secara khusus, pengguna dengan akses yang menerima surat dari pimpinan di atas, menanggapi disposisi mereka, dan juga mendistribusikan surat kepada anggota staf dengan akun dan pemimpin junior.

4. *Staff.*

Yaitu pengguna yang memiliki akun *e-Office* dan diberikan wewenang untuk menerima disposisi serta memiliki kemampuan untuk membalas disposisi surat yang diterima dari pimpinan.

2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *e-Office*.

Faktor yang dapat mempengaruhi *e-Office* dalam suatu organisasi (Prayudha, 2012) yaitu :

1. Infrastruktur Teknologi Informasi (TI) merupakan fondasi utama yang dikelola oleh kelompok sistem informasi. Infrastruktur ini menjadi kerangka dasar yang mendukung kemampuan TI yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi bisnis.
2. Sumber daya manusia (SDM) dan keahlian memegang peran sentral dalam kesuksesan suatu organisasi. SDM melibatkan keterampilan, baik *hard skill* maupun *soft skill*, serta melibatkan sumber daya fisik, mental, dan spiritual seperti roh, pengetahuan, moral, kepribadian, kecerdasan, perilaku, dan pengalaman. Organisasi yang sukses tidak dapat dipisahkan dari keberadaan SDM yang kuat, model bisnis yang teruji, dan budaya tempat kerja yang positif. Organisasi harus fokus pada isu-isu terkait SDM guna

menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam sepuluh tahun mendatang. Tantangan-tantangan tersebut melibatkan penanganan kepentingan pemangku kepentingan, globalisasi, dan proses kerja yang semakin kompleks.

Sistem keamanan menjadi elemen penting dalam sebuah sistem informasi. Namun, pemilik dan pengelola sistem sering kali mengabaikan keamanan sebagai prioritas utama. Masalah keamanan sering menempati urutan kedua atau bahkan terakhir dalam daftar prioritas. Keamanan sistem sering kali dikurangi atau ditinggalkan jika menghambat kinerja sistem.

4. Internal organisasi lingkungan internal merupakan kejadian dan kecendrungan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen karyawan, serta budaya organisasi. Organisasi sesuai dengan konsep masa kini adalah kumpulan dari berbagai macam sumber daya, kapabilitas dan kompetensi yang selanjutnya bisa digunakan untuk membentuk posisi tertentu.

Sosial dan budaya dalam konteks organisasi merujuk pada perekat sosial yang melekat di dalamnya. Menurut Cameron dan Quinn, budaya organisasi mencakup nilai-nilai, kebiasaan, dan kepercayaan yang mencirikan karakteristik organisasi dan seluruh anggotanya. Budaya organisasi menjadi fokus utama ketika melibatkan proses perubahan di dalam organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.6 Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Edwin B. Flippo (1994:5) dikutip dalam Samsuni, S. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia, juga dikenal sebagai manajemen personalia, mencakup serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga keputusan hubungan kerja. Ini melibatkan pengembangan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pengelolaan hubungan kerja dengan sumber daya manusia guna mencapai tujuan yang diinginkan, baik secara individu, organisasional, maupun masyarakat. Menurut Siswanto Sastrohadwiryo (2002) dikutip dalam Samsuni, S. (2017) Penggantian istilah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan Manajemen Tenaga Kerja menekankan pada pendayagunaan, pembinaan, pengetahuan, pengaturan, dan pengembangan unsur tenaga kerja. Termasuk dalam cakupan manajemen ini adalah evaluasi kinerja baik dan buruk karyawan atau pegawai, dengan tujuan mencapai hasil dan daya guna seoptimal mungkin sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Menurut Arraniri, I. dkk (2021) Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah konsep yang berkaitan dengan pengelolaan individu, kelompok, atau orang-orang dalam suatu organisasi. Untuk memahami esensi Manajemen Sumber Daya Manusia, penting untuk memahami peran dan tindakan yang dilakukan oleh manajer. Seorang manajer memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengarahkan usaha para karyawan di dalamnya. Menurut Marwansyah (2010) dikutip dalam Samsuni, S. (2017) Manajemen melibatkan optimalisasi penggunaan sumber daya manusia di dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



suatu organisasi melalui berbagai fungsi, seperti perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta manajemen hubungan industrial.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia melibatkan serangkaian proses, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan, yang bertujuan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi dengan cara yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasional.

2.7 Pandangan Islam

Dalam ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW abad silam telah diturunkan wahyu bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan Al-Qur'an menekankan keunggulan orang yang berilmu dari pada yang tidak berilmu. Seperti dalam firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 9:

أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Artinya : (Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, "Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

Selama sains atau ilmu pengetahuan itu tetap dalam upaya untuk mencari kebenaran dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam alam ini, tidak akan pernah ada masalah. Karena Islamlah yang pertama-tama akan mengajak dan menggalakkan manusia untuk mengungkapkannya rahasia-rahasia alam itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta mengambil manfaat dari padanya. Problematika kita bukanlah antar Islam dan ilmu pengetahuan (karena kaitannya jelas) tetapi antara muslim atau penganut Islam itu dan ilmu pengetahuan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini muncul sebagai hasil inspirasi dari beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus dan tema yang akan dijelajahi. Dengan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, penulis telah memilih beberapa sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan penelitian ini:

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

NO	Penulis dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Fausia dan Marsofiyati, (2019) Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran Volume 3, No 1 Judul: "Penerapan dan Pemanfaatan <i>E-Officei</i> Sebagai Perwujudan <i>Paperless Office</i> dengan metodei penelitian yang digunakan adalah studi liteirature"	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 55 persen dari 100 talenta yang disurvei memilih menjadi karyawan di kantor. Jadi bisa dikatakan bekerja di kantoran merupakan hal yang sangat digemari oleh semua orang. Salah satu beintuk komunikasi di perkantoran adalah dengan surat menyurat atau surat menyurat dengan menggunakan kertas.	Persamaan: - Perbedaan: Perbedaan dengan penelitian yaitu metodei penelitian, focus dan lokusnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>(Rissa Oktaviana, Khairunsyah Puirba, dan Arif Buidi Seitiawan 2019). <i>PROSIDING</i>, 17.</p> <p>Judul: “Inovasi Kebijakan <i>e-Office</i> Pemerintah Provinsi Riau dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan”.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan kebijakan <i>e-Office</i> di instansi Pemerintah Provinsi Riau belum terlaksana secara optimal dikarenakan terdapat beberapa factor yang menghambat yaitu faktor kepemimpinan, dimana beberapa pimpinan instansi tidak menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk mendukung proses penerapan kebijakan <i>e-Office</i>, tidak adanya sanksi penegasan dari pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang mengakibatkan kebijakan <i>e-Office</i> dianggap hanya kebijakan biasa, yang jika tidak dilaksanakan tidak ada dampak negatif terhadap instansi tersebut, kemudian pelatihan yang diberikan oleh Diskominfotik tidak memberikan informasi yang jelas terhadap pegawai instansi terkait tentang bagaimana pengelolaan <i>e-Office</i>.</p>	<p>Persamaan: Metode Penelitian dan lokus penelitian</p> <p>Perbedaan: Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terhadap Fokus nya yaitu dimana peneliti berfokus pada Implementasi <i>e-Office</i>, Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada inovasi kebijakan <i>e-Office</i> untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.</p>
<p>(Ramos Nathalio Sinaga 2022).</p> <p>Judul: “Penerapan <i>e-Office</i> Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sesuai dengan teori TAM yang digunakan diketahui minat Diskominfo Provinsi Papua Barat dalam penggunaan <i>e-Office</i> terkendala pada indikator kemudahan penggunaan <i>e-Office</i> hal ini dikarenakan tidak semua pegawai memiliki kemampuan</p>	<p>Persamaan : Metode Penelitian analisis deskriptif kualitatif.</p> <p>Perbedaan : Perbedaan dengan penelitian yaitu grand teori, focus penelitian dan lokus penelitian.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Persandian Provinsi Papua Barat”.</p>	<p>pengoperasian perangkat <i>e-Office</i> karena terkendala usia dan skill yang dimiliki kemudian kesiapan penerapan <i>e-Office</i> dalam pengelolaan surat elektronik sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan hambatan dalam penerapannya.</p>	
<p>4</p>	<p>(Karen Betsy Linelejan, 2021). JURNAL PAPTUNG: Vol. 4 No. 1 Judul: “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Berbasis Sistem Aplikasi <i>e-Office</i> Pada Unit Layanan Administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara”</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi kebijakan pelayanan administrasi berbasis sistem aplikasi <i>e-Office</i> Pada Unit Layanan Administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara masih belum berjalan dengan baik karena faktor sumber daya dan struktur birokrasi yang belum berjalan dengan baik.</p>	<p>Persamaan : - Perbedaan: Penelitian yang ingin dilakukan penulis berbeda dalam lokus dan fokusnya. Peneliti berfokus pada implementasi <i>e-Office</i> pada dinas Bappedalitbang Prov. Riau Sedangkan peneliti terdahulu berfokus pada Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Berbasis Sistem Aplikasi <i>e-Office</i> Pada Unit Layanan Administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>(Nila Safrida, Nodi Marefanda, dan Dara Amelia. 2022). JOURNAL OF PUBLIC SERVICE- VOL. 2 NO. 1</p>	<p>Hasil penelitian menunjukan bahwa, implementasi SIMDA Keuangan dapat dilaksanakan dengan baik dimana pengguna memahami dan mendukung kebijakan penggunaan SIMDA. Namun, dalam penerapan SIMDA masih terdapat kendala seperti</p>	<p>Persamaan : Metode penelitian Perbedaan: Penelitian yang ingin dilakukan penulis berbeda dalam lokus dan fokusnya. Peneliti berfokus pada</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Judul: “Analisis Penerapan <i>E-Government</i> Melalui Aplikasi SIMDA pada Subbag Keuangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat.”	gangguan jaringan, perbedaan kode rekening antara simda dan DPA, masih kurangnya jumlah SDM, ekspor dan impor data masih secara manual, dan belum adanya fitur interaksi pada aplikasi serta tidak adanya pedoman baku maupun sosialisasi penggunaan simda keuangan.	implementasi <i>e-Office</i> pada dinas Bappedalitbang Prov. Riau Sedangkan peneliti terdahulu berfokus pada Analisis Penerapan <i>E-Government</i> Melalui Aplikasi SIMDA pada Subbag Keuangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat.
--	--	---

2.9 Definisi Konsep

Menurut Soedjadi (2000:14) dikutip dalam Erlangga, A. (2022) adalah suatu gagasan abstrak yang biasanya dinyatakan dengan “istilah klasifikasi” atau “kelompok kata” biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan atau memperjelas gagasan. Adapun Definisi Konsep dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik adalah suatu arahan umum yang dinyatakan melalui instruksi dan aturan tentang jangkauannya. Kebijakan publik ini dibuat oleh Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa seluruh OPD yang berada di lingkungan Provinsi Riau harus menggunakan aplikasi perkantoran secara elektronik *e-Office* dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.
3. *E-government* merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses-proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Organisasi bertujuan menerapkan teknologi informasi untuk mencapai proses terintegrasi dan terbatas dari pemerintah ke pemerintah, karena peran kunci teknologi informasi dalam proses bisnis.
4. *e-Office* merupakan implementasi dari *e-Government* yang mencakup sarana dan prasarana untuk pengelolaan komunikasi tertulis, seperti dalam surat menyurat.
5. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) unit organisasi yang bertugas mendukung kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang berada di bawah kewenangan daerah.
6. SPT (Surat Perintah Tugas) merupakan naskah dinas dari atasan kepada bawahan yang berisi perintah untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Kinerja adalah hasil kerja seorang pegawai, yang didefinisikan oleh kemampuannya untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. *Content of policy* merupakan sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah.
9. *Context of Implementation* merupakan sekumpulan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan dan apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya.

2.10 Konsep Operasional

Gagasan operasional dapat dilihat sebagai komponen yang menjelaskan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga jelas dari pengukuran tersebut indikasi mana yang digunakan sebagai dasar analisis berikut :

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi kebijakan model Merilee S.Grindle	i. Isi Kebijakan (<i>The Content of Policy</i>)	a. <i>extent of changei envisioned</i> atau derajat perubahan yang ingin diwujudkan; b. <i>program Implementors</i> atau para pelaksana implementasi program; c. <i>resources committeei</i> atau sumber daya yang ditunjuk sebagai implementator. d. <i>Type of benefits</i> (tipe manfaat) atau jenis manfaat yang diterima oleh target groups.
	ii. lingkungan implementasi (<i>context of implementation</i>)	a. <i>interests affected</i> atau kepentingan yang terpengaruhi; Kejelasan; b. <i>institution and regimei characteristics</i> atau

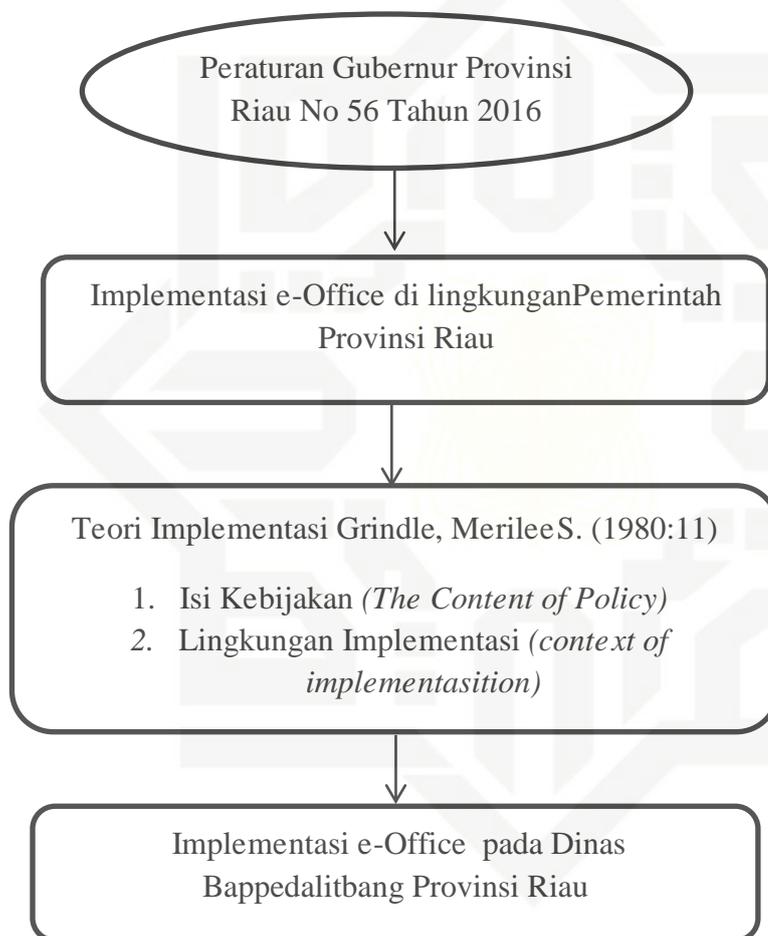
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		karakteristik lembaga dan penguasa; c. <i>Compliance and responsiveness</i> (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)
--	--	---

Sumber: Teori Implementasi Grindle, Merilee S. (1980:11)

2.11 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir (Sumber Penulis 2023)



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini berlokasi di kota pekanbaru tepatnya di Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau. Jl. Gajah Mada No.200 Telp. 36031- 36032, Fax (0761) 36035 Email : sekretariat@bappeda.riau.go.id. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan Bappedalitbang Provinsi Riau sebagai salah satu OPD pemerintahan yang secara signifikan banyak terlibat dalam proses penerimaan dan penanganan surat masuk. Dengan demikian, lokasi ini dianggap strategis untuk implementasi Sistem Informasi E-Office, memungkinkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan administrasi yang melibatkan surat masuk.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2016), metode penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berlandaskan dari filsafat post positivisme, penelitian ini dapat digunakan dalam meneliti suatu objek alamiah (eksperimen), dimana dalam bentuk konteks alamiah itu, dalam bentuk instrumen kunci, teknik pengumpulan data dan dilakukan dalam bentuk triangulasi (gabungan), analisis data itu bersifat induktif/kualitatif dari hasil penelitian kualitatif lebih cenderung menekan pada makna generalisasi. Yang menekan pada penelitian dengan menganalisis, teknik pengumpulan data kualitatif ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan sebuah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

studi kasus lapangan yang bertujuan untuk menghasilkan data yang relevan. Metode penelitian penulis adalah metode deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang sedang berlangsung, tujuannya untuk mendeskripsikan sebuah masalah itu sendiri, riset penelitian ini berfokus pada rumusan masalah penelitian, deskriptif juga mendapatkan bentuk dari penelitian verbal atau numerik. Sedangkan metode yang digunakan penelitian adalah kualitatif. Data kualitatif menurut Sugiyono (2016) yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

3.2.1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016), data primer adalah pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara langsung, komunikasi melalui telepon, atau komunikasi tidak langsung seperti surat, email, dan lain-lain. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang diperoleh merupakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari pegawai Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau.

3.2.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016), data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan penelitian atau dari sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti. Sumber data sekunder ini umumnya melibatkan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perantara seperti buku, artikel, serta dokumen berupa rekaman suara dan foto sebagai bukti pelaksanaan penelitian yang valid.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam buku Sugiyono (2016) merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid, dapat dipercaya dan objektif (sesuai dengan realitas).

3.3.1 *Indept Interview*

Wawancara mendalam (*indept interview*) adalah teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data atau informasi dari informan, baik itu *key informan* maupun informan biasa. Proses wawancara direkam menggunakan perekam suara (*tap recorder*). Teknik pengumpulan data ini bergantung pada laporan diri sendiri atau *self-report*, minimalnya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Adapun Menurut Sugiyono (2016), wawancara personal (*personal interviewing*) dapat dijelaskan sebagai interaksi wawancara antara dua individu, yakni antara peneliti (pewawancara) dan informan (yang diwawancarai). Pewawancara hanya sebagai pemandu jalannya wawancara sesuai dengan *guidance* yang telah ditetapkan sebelum kelapangan untuk tujuan memperoleh informasi yang relafan, reliable dan valid.

3.3.2 Observasi

Menurut Sugiyono (2016), Observasi merupakan salah satu instrument yang penting dalam penelitian kualitatif. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di lingkungan kerja atau kantor Dinas Badan Perencanaan



Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau. Yang termasuk dalam objek observasi adalah bagaimana suasana kantor, bagaimana para pegawai bekerja dalam tugasnya masing-masing, bagaimana hal-hal terkait tentang penelitian ini dilakukan dan bagaimana gambaran secara deskriptif tentang keadaan kantor.

Dikutip dalam buku Sugiyono (2016), Observasi inipun menjadi sangat penting, terutama untuk mengamati secara detail bagaimana proses imlementasi *e-Office* berlangsung di Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau, observasi juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana perilaku dalam menjalankan tugas. Penelitian ini melibatkan pengamatan mulai dari kondisi fisik kantor Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau, mengamati setiap ruangan baik secara bagian maupun fungsinya, dan mengamati sumber daya manusia yang ada baik ketika menjalankan tugas-tugas administratif yang ada.

3.3.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016), Dokumentasi merupakan catatan-catatan khusus yang berkaitan dengan informasi mengenai Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau atau suatu bantuan penelitian berupa pengumpulan informasi dari dokumen yang terkait dengan objek penelitian baik berupa gambaran-gambaran kertas, artikel, dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dianggap sebagai cara pengumpulan data yang cukup sederhana, karena peneliti hanya perlu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengamati benda mati. Jika data yang diperoleh terlihat kurang valid, penyesuaian dapat dilakukan dengan relatif mudah. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup struktur organisasi Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau.

3.4 Informan Penelitian

Sugiyono (2016) berpendapat bahwa informan penelitian adalah orang yang mengetahui suatu informasi mengenai objek pada penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yang mana peneliti memilih informan yang paling mengetahui tentang Implementasi *Electronic Office* (E-Office) Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau. Berikut yang menjadi informan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

NO	KEY INFORMAN	NAMA	JABATAN
1	Kassubbag Kepegawaian dan Umum	Nurhayati, S.Pi. MSc	Kassubbag Kepegawaian dan Umum
2	Sekretariat Subbagian Keuangan, Perlengkapan Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	A.Rahman SE,	Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator)
3	Sekretariat Subbagian Kepegawaian dan Umum	Heru Herdiansyah, S.Kom	Tenaga Ahli Perangkat Lunak
4	Sekretariat Subbagian Kepegawaian dan Umum	Zuriani SE,	Operator Surat
5	Sekretariat Subbagian Kepegawaian dan Umum	Irnowati SE, M.Si	Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator)
6	Sekretariat Subbagian Kepegawaian dan Umum	Henni Oktafia, SE, MM	Staff Subbag Kepegawaian dan Umum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Sekretariat Subbagian Kepegawaian dan Umum	Winda Kusuma Dewi S.TP	Staff Subbag Kepegawaian dan Umum
8	Sekretariat Subbagian Kepegawaian dan Umum	Isnaini S.Sos	Staff Subbag Kepegawaian dan Umum

Sumber : Dinas Bappedalitbang Provinsi Riau 2023

3.5 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2016) mendefinisikan analisis data sebagai langkah untuk mengelompokkan dan mengurutkan data sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, dengan tujuan memperoleh hasil yang sesuai dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi *e-Office* dan faktor yang mempengaruhi implementasi *e-Office* pada Dinas Bappedalitbang Provinsi Riau, peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran mengenai situasi dan kejadian kejadian.

Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

a. Reduksi data

Menurut miles dan huberman dalam Sugiyono,(2016) reduksi data dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang melibatkan pemilihan data, penumpuan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangkan sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penyajian data

Sugiyono (2016), berpendapat bahwa Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan supaya penyaji data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Adapun Menurut Sugiyono (2016), Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah di dapatkan kesimpulan yang sempurna sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Bappedalitbang Provinsi Riau

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan suatu badan yang dibentuk sebagai suatu usaha untuk menjamin lajunya perkembangan. Adapun kronologi pembentukan kelembagaan Bappeda Tingkat I Riau dan personilnya adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1974 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau Nomor Ktps.94/VII/75 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Daerah Tingkat 1 Riau, Tanggal 23 Juli 1975, ditanda tangani oleh Gubernur Riau Arifin Ahmad. Ketua Bappeda Tingkat 1 Riau pertama kali dijabat dari unsur Setwilda Tingkat 1, Perguruan Tinggi dan Dinas Instansi.
4. Pengangkatan Pegawai Bappeda Sebanyak 14 orang pada tahun 1976.
5. Kantor Bappeda menumpang di gedung kantor BUCD (Basan Urusan Cees Daerah) Jalan Cut Nyak Dien pada tanggal 15 Juli 1974.
6. Kepres No.27 tahun 1980 tentang Pembentukan Bappeda dan Mencabut Kepres No.15 tahun 1974.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.183 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Tingkat I dan II



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Peraturan Daerah No.3 tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Tingkat 1 Riau
9. Surat Keputusan Gubernur Riau Tanggal 29 Mei 1985 tentang Personil Bappeda dari Unsur Perguruan Tinggi dan Pemda.
10. Keputusan Gubernur KDH Tingkat 1 Riau No.Ktps/IX/1992 tanggal 24 September 1992, tentang Pengembalian Pegawai Negeri Sipil/Dosen dari Universitas Riau yang bekerja pada Bappeda Tingkat 1 Riau.
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 21 tahun 2001 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

4.2 Visi dan Misi

4.2.1 Visi

Dalam rangka mendukung mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2019-2024, yaitu **“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”**.

1. Berdaya Saing, artinya : Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari.
2. Sejahtera, artinya : Kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bermartabat, artinya : Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegras melalui pengalaman nilai-nilai agama serta penerapan falsafah budaya melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.
4. Unggul, artinya : Menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

4.2.2 Misi

Adapun Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian Visi dengan memperhatikan kondisi tantangan kedepan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing Global melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya;
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan;
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing;
4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing; dan
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi.

4.3 Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Bappedalitbang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pada Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kesekretariatan, Bidang Perencanaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

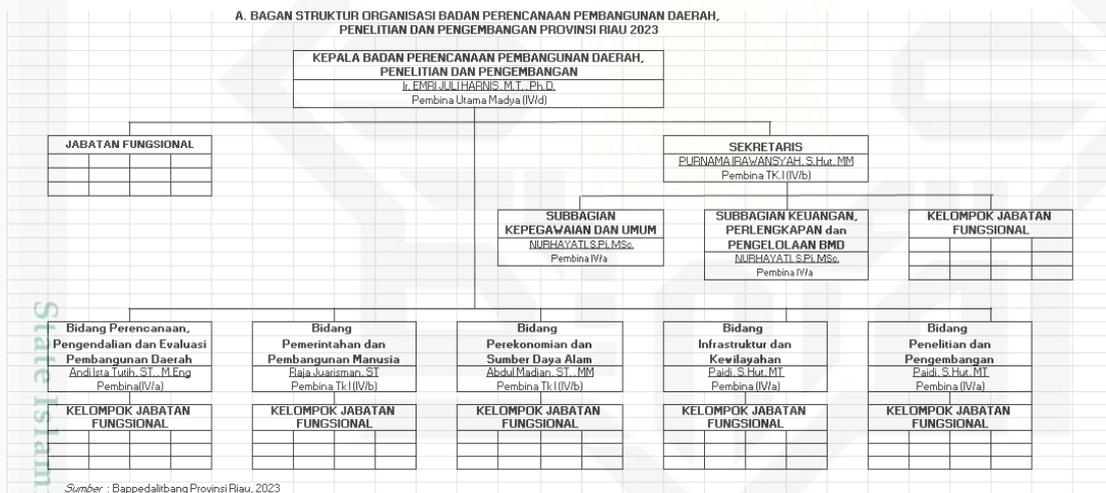
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

4.4 Struktur Organisasi

Bagan struktur Bappedalitbang sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut :

Gambar 4.1 Bagan Struktur Bappedalitbang Provinsi Riau



4.5 Uraian Tugas (Job description) Bagian/ Unit Kerja

Bappedalitbang Provinsi Riau sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau memiliki beberapa bidang /unit kerja, yaitu :

A. Bidang Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbagian perencanaan program, subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan subbagian kepegawaian umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang sekretariat terdiri atas :

a) Subbidang Umum dan Kepegawaian

Subbidang Umum dan Kepegawaian memiliki tugas sebagai berikut :

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian kepegawaian umum;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian kepegawaian dan umum;
- Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB), Analisa Beban Kerja (ABK), peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;

b) Subbag.Keuangan dan Perlengkapan

Subbag. Keuangan dan Perlengkapan memiliki tugas sebagai berikut :

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- Melaksanakan penyesuaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;

B. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- a) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Pendanaan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, menyelenggarakan fungsi :
 - Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan dan pendanaan;
 - Pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui b. pendekatan holistik integratif;
 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek Daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- b) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Data dan Informasi Pembangunan Daerah;
 - pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
 - pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah (RPJPD dan RPJMD);
 - pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- c) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- pelaksanaan koordinasi evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;

C. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- a) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, menyelenggarakan fungsi :
 - penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah Sektor

Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi;

- pelaksanaan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kebencanaan;
- pelaksanaan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kebencanaan;
- pelaksanaan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kebencanaan;
- pelaksanaan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kebencanaan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan, Budaya dan Pemuda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, menyelenggarakan fungsi:
 - penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Ketenagakerjaan;
 - pelaksanaan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
 - pelaksanaan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
 - pelaksanaan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
 - pelaksanaan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
- c) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan dan

Keluarga Berencana pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- pelaksanaan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- pelaksanaan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- pelaksanaan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- pelaksanaan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- a) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, menyelenggarakan fungsi :
 - penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
 - pelaksanaan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan, Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
 - pelaksanaan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
 - pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
 - pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
 - penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata;
 - pelaksanaan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pariwisata;
 - pelaksanaan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Pariwisata;
 - pelaksanaan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pariwisata;
 - pelaksanaan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Pariwisata;
- c) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, menyelenggarakan fungsi:
 - penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah urusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;

- pelaksanaan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
- pelaksanaan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
- pelaksanaan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
- pelaksanaan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;

E. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- a) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - pelaksanaan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - pelaksanaan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - pelaksanaan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - pelaksanaan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - pelaksanaan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - pelaksanaan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - pelaksanaan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - pelaksanaan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Tata Ruang dan Pertanahan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Tata Ruang dan Pertanahan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pelaksanaan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Tata Ruang dan Pertanahan;
- pelaksanaan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Tata Ruang dan Pertanahan;
- pelaksanaan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Tata Ruang dan Pertanahan;
- pelaksanaan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Tata Ruang dan Pertanahan;

F. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penelitian dan Pengembangan Permintahan dan Pembangunan Manusia pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi :
 - penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat serta Badan Usaha Milik Daerah;
- pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa;
 - pelaksanaan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- b) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penelitian dan Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Penelitian dan Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, pariwisata serta inovasi sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan daerah;
- pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, kelautan dan perikanan, peternakan dan kesehatan hewan, dan perkebunan;
- pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- pelaksanaan fasilitasi kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - pelaksanaan fasilitasi kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - pelaksanaan fasilitasi hak kekayaan intelektual pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal Infrastruktur dan Kewilayahan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi e-Office guna mendukung langkah e-government di lingkungan kerja Bappedalitbang Provinsi Riau secara umum memberikan dampak yang positif bagi para pegawainya dengan adanya e-Office ini mempermudah para pegawai dalam mengirim atau memeriksa naskah dinas yang sedang diperlukan, karena cukup dengan satu aplikasi sudah terintegrasi ke berbagai unit kerja maupun ke berbagai instansi.

Namun, tidak bisa dipungkiri masih adanya indikator yang belum terlaksana dengan baik, yakni pada *Resources committed* ini dikarenakan masih adanya sarana prasarana yang masih belum optimal. Karena terdapat kekurangan yang signifikan dalam hal sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi e-Office seperti mesin pemindai (*scanner*) dan komputer PC, yang menghambat pelaksanaan e-Office secara efektif. Selain itu, masih adanya pegawai yang masih kurang paham dengan perubahan teknologi meskipun sudah dilakukannya pelatihan dan pengenalan tentang e-Office.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini adapun saran mengenai pengimplementasian e-Office di Bappedalitbang Provinsi Riau yaitu perlu ditingkatkan dengan segera memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti peningkatan kapasitas server dan kecepatan internet. Pelatihan rutin untuk meningkatkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecakupan digital pegawai sangat diperlukan, bersama dengan peningkatan keamanan siber melalui audit berkala. Monitoring dan evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan sistem berjalan lancar dan terus berkembang sesuai kebutuhan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penerapan e-Office di Bappedalitbang Provinsi Riau menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam hal ini, yang dapat memberikan gambaran mengenai pengimplementasian e-Office di lingkungan Bappedalitbang Provinsi Riau yang belum sepenuhnya sempurna, maka dari itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pengimplementasian yang sudah ada dengan memperhatikan kekurangan sarana dan prasarana masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi untuk memastikan kelancaran dan efektivitas dari penerapan sistem e-Office di lingkungan kerja Bappedalitbang Provinsi Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anam, C. (2023). *Implementation of E-Office Applications at Universitas Negeri Malang (UM)*. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 11(1), 1-7.
- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54-65.
- Arraniri, I., Firmansyah, H., Wiliana, E., Setyaningsih, D., Susiati, A., Megaster, T., ... & Arif, M. (2021). *Manajemen sumber daya manusia*. Penerbit Insania.
- Chen, Y. C., & Perry, J. (2003). *Outsourcing for e-government: Managing for success*. *Public Performance & Management Review*, 26(4), 404-421.
- Choiriyah, I. U. (2020). Penerapan e-government melalui m-bank di Kabupaten Sidoarjo. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 5(2), 126-135.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy*. Pearson.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Edwin B. Flippo, *Manajemen Personalia*, terjemahan Moh. Mas'ud, Jilid. 1, (Jakarta: Erlangga, 1994), h. 5.
- Erlangga, A. (2022). Menggali Konsep Estetika (Magello dan Cantippa) dalam Pertunjukan Musik Tari Pakarena. *Jurnal Hasil Penelitian*, 7(2), 9-25.
- Firmansyah, M. F., Gantini, V. A., & Tistari, D. D. (2022). Implementasi Kebijakan Digital Governance Dalam Bentuk Inovasi Potensi Desa Di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Jersey.
- Gusman, D. T. (2023). Implementasi E-office Dalam Mendukung E-government Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(1), 110-126.
- Hadi, N., & Tarwan, O. (2019). Pengaruh Emphaty, Tangible, Responsiveness, Kedisiplinan Pegawai Terhadap Kepuasan Masyarakat di Pemerintahan Desa. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 6(2), 1-16.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13-26.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Herdiana, F. (2019). Penerapan Dan Pemanfaatan E-Office Sebagai Dalam Perwujudan Paperless Office. *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 3(1), 68-74.
- Irawan, A. (2018). Sistem pelayanan publik berbasis E-government pada pemerintah daerah kabupaten merauke. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 7(1), 20-37.
- Irawan, B. (2017). Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Paradigma (JP)*, 2(1), 174-201.
- Indonesia, I. (2021). Sistem Manajemen Perkantoran dan Persuratan Elektronik. <https://www.integraindonesia.co.id/e-office/>
- Leyn, A. N. (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur. *Unika Widya Mandira*.
- Linelejan, K. B. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Berbasis Sistem Aplikasi E-Office Pada Unit Layanan Administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 4(1), 90-98.
- Safrida, N., Marefanda, N., & Amelia, D. (2022). Analisis Penerapan E-Government Melalui Aplikasi SIMDA pada Subbag Keuangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Public Service*, 2(1), 8-14.
- Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 3.
- Mulyono, T. (2018). Pendukung Program Paperless Korespondensi Perkantoran (Studi Kasus: Bagian Administrasi Akademik-Akademi Komunitas Semen Indonesia Gresik). *Indonesia: ECNOSCIENZA*, 2018., 2
- Nala, A. (2021). Penerapan E Office di Sekda Kota Solo. *Jurnal Informasi Dan Komunikasi* 2(2), 83–97. *Administrasi Perkantoran*, 5(2).
- Narsen, N., & Sugiarto, A. (2022). Penerapan Dan Pemanfaatan E-Office Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Salatiga. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 6(2), 102–113.
- Nasution, A. P., & Malikhah, I. (2020). Implementasi e-office sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada universitas pembangunan panca budi. *Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(2), 1-11.
- Oktaviana, R., Purba, K., & Setiawan, A. B. Inovasi Kebijakan E-Office Pemerintah Provinsi Riau dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan. *PROSIDING*, 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oktaviana, R. (2018). IMPLEMENTASI E-OFFICE PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU. Repository Uin Suska.

Oktavya, A. A. (2015). Penerapan (*Electronic Government*) *E-Government* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1433-1447.

Samsuni, S. (2017). Manajemen sumber daya manusia. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 17(1), 113-124.

Sinaga, R. N. (2022). *Penerapan E-office Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Papua* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Siswanto Sastrohadiwiryono. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administrasi dan Operasional. (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 57.

Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1 :

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI E-OFFICE PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU

Pertanyaan wawancara berdasarkan indikator pada model implementasi Merilee S. Grindle, 1980.

a) *Isi Kebijakan (content of policy)*

1. *Type of benefits* (tipe manfaat atau jenis manfaat)
2. *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan)
3. *Program Implementors* atau para pelaksana implementasi program;
4. *Resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

b) *Konteks Implementasi (Context of implementation)*

1. *Interests affected* atau kepentingan yang terpengaruhi
2. *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan penguasa)
3. *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Tujuan Informan
Isi kebijakan (Content of Policy)	Derajat Perubahan yang ingin dicapai atau (<i>Extent of change envisioned</i>)	1) Seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan e-office? 2) Apakah perubahan tersebut sudah tercapai? Jika belum, apa yang perlu dilakukan untuk mencapai perubahan tersebut?	1. Kassubbag Kepegawaian dan Umum : Nurhayati, S.Pi. MSc 2. Staff Subbag Kepegawaian dan Umum : Isnaini S.Sos
	Pelaksana Program atau (<i>Program Implementors</i>)	1) Siapa sajakah pejabat yang berwenang terkait dalam	1. Kassubbag Kepegawaian dan Umum : Nurhayati,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>implementasi kebijakan program e-office pada kantor bappedalitbang provinsi riau ini? dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan E-office pada kantor bappedalitbang provinsi riau ini? 3) bagaimana anda menilai dampak kemampuan pelaksana program e-office terhadap efisiensi dan produktivitas organisasi pada instansi secara keseluruhan? 4) Faktor Apa saja yang mempengaruhi dalam implementasi <i>E -Office</i> pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau? 	<p>S.Pi. MSc 2. Pelaksana Program Tenaga Ahli Perangkat Lunak : Heru Herdiansyah, S.Kom</p>
	<p>Sumber Daya Yang Digunakan atau (<i>Resources committed</i>).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah sebuah program di dukung sumber daya yang memadai untuk implementasi e-Office baik sumber daya manusia (SDM) maupun sarana prasana? 2) Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan E-Office? 3) Apakah ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kassubbag Kepegawaian dan Umum : Nurhayati, S.Pi. MSc 2. Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator) : A.Rahman SE,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		solusi/tindakan yang dilakukan pihak bepeda terkait sarana/prasarana untuk mendukung e-office?	
	Tipe Manfaat (Type Of Benefits)	1) Bagaimana dampak positif atau manfaat yang di hasilkan dari pelaksanaan implementasi e-Office ini? Apakah dengan menggunakan E-Office ini memberikan perbedaan yang signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai?	1. Operator Surat : Zuriani SE, 2. Staff Subbag Kepegawaian dan Umum : Winda Kusuma Dewi S.TP
Konteks Implementasi (Context of Implementation)	Kepentingan Yang Terpengaruhi atau (Interests affected)	1) Menurut Bapak/Ibu dengan menggunakan media E-Office ini apakah berpengaruh signifikan pada hasil pekerjaan, apakah pengaruh yang di timbulkan itu semakin baik / buruk atau tidak memberikan pengaruh apa-apa?	1. Kassubbag Kepegawaian dan Umum : Nurhayati, S.Pi. MSc 2. Staff Subbag Kepegawaian dan Umum : Henni Oktafia, SE, MM
	Karakteristik Pimpinan atau (Institution and regime characteristic)	1) Apa saja karakteristik / peran pimpinan dalam melaksanakan kebijakan e-office? 2) Apakah ada tantangan atau hambatan yang di hadapi dalam mengimplementasikan e-office dari sisi organisasi? Jika ya,	1. Kassubbag Kepegawaian dan Umum : Nurhayati, S.Pi. MSc

	apa saja, dan bagaimana cara mengatasinya.	
<i>Compliance and responsiveness</i> (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Seberapa patuh dan responsive pegawai terhadap perubahan yang dibawa oleh E-Office? 2) Apakah mereka cepat menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi baru ini? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kassubbag Kepegawaian dan Umum : Nurhayati, S.Pi. MSc 2. Pelaksana Program Tenaga Ahli Perangkat Lunak : Heru Herdiansyah, S.Kom 3. Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator) : Irnawati SE, M.Si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2 :

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Bersama Ibu Nurhayati, S.Pi., M.Sc. Selaku Kassubbag Kepegawaian dan Umum di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Ibu Zuriani,SE selaku Operator Surat di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak Heru Harliansyah,S.Kom selaku Pelaksana Program Tenaga Ahli Perangkat Lunak di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak A.Rahman SE, selaku Subbagian Keuangan, Perlengkapan Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 3 :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1884/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024 Pekanbaru, 26 Februari 2024 M
 Sifat : Biasa 16 Sya'ban 1445 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Syed Agung Afandi, M.I.P**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Nursavinah
 NIM : 12070523092
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI ELECTRONIC OFFICE (E-OFFICE) PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) PROVINSI RIAU"**.

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Haruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran 4 :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor	: B-2038/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2024	Pekanbaru, 01 Maret 2024 M
S i f a t	: Biasa	20 Sya'ban 1445 H
Lampiran	: -	
Hal	: Izin Riset	

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

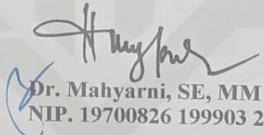
Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

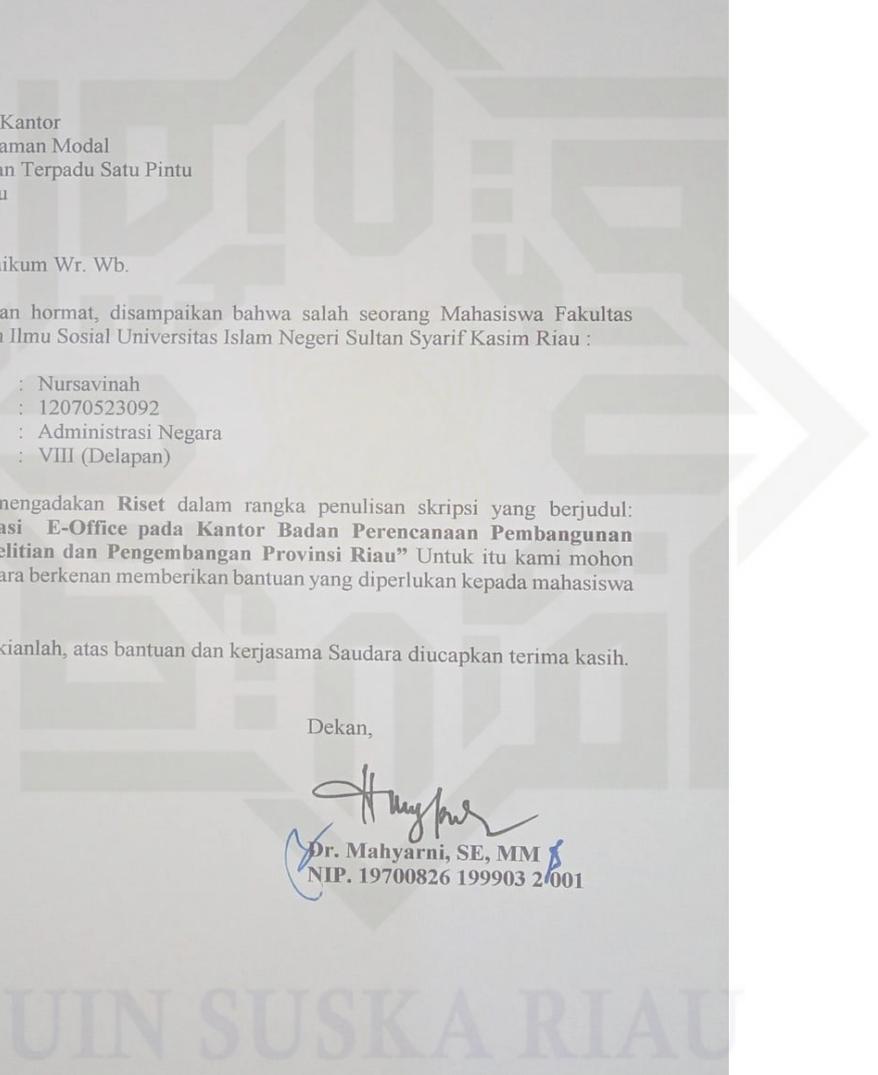
Nama	: Nursavinah
NIM.	: 12070523092
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Implementasi E-Office pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2001



UIN SUSKA RIAU



Lampiran 5 :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/60569
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-6572/Un.04/F.VII/PP.00.9/10/2023 Tanggal 14 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

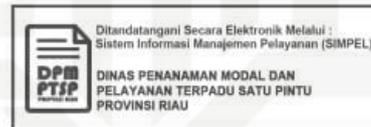
1. Nama	:	NURSAVINAH
2. NIM / KTP	:	12070523092
3. Program Studi	:	ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	IMPLEMENTASI ELECTRONIC OFFICE (E-OFFICE) PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) PROVINSI RIAU
7. Lokasi Penelitian	:	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) PROVINSI RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 November 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 6 :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
 Jln. Gajah Mada No. 200 Telp. (0761) 36031-36032 Fax. (0761) 36035
 e-mail : bappedalitbang@riau.go.id
PEKANBARU

NOTA DINAS

Yth. : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Dari : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Tembusan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum Sekretariat
 Tanggal : 08 Desember 2023
 Nomor : 000/BAPPEDALITBANG-Sekr/0246
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : PERMINTAAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI DENGAN JUDUL PENELITIAN IMPLEMENTASI ELECTRONIC OFFICE (E-OFFICE) PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG PROVINSI RIAU). a.n. Nursavinah

Sesuai dengan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/ DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/60569 Tanggal 21 November 2023 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Terhitung Mulai Tanggal 21 November 2023 sampai dengan 21 Mei 2024, bersama ini disampaikan pelaksanaan Riset tersebut di bawah ini :

NO	NAMA/NIM	TEMPAT TUGAS
1.	Nursavinah/12070523092	SEKRETARIAT BAPPEDALITBANG PROVINSI RIAU

Yang bersangkutan diterima untuk melakukan Riset dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan;
2. Tidak menuntut Honor atau Upah selama menjalani proses kegiatan pengumpulan data;
3. Tidak menuntut diangkat menjadi THL dilingkup Bappedalitbang Provinsi Riau.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Catatan

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
 Sifat ini dapat dibuktikan keabsahannya di e-office.riau.go.id dengan scan QR-Code



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran 7 :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
 Jln. Gajah Mada No. 200 Telp. (0761) 36031-36032 Fax. (0761) 36035
 e-mail : bappedalitbang@riau.go.id
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 400.14.5.4/BAPPEDALITBANG-Sekr/2024/0012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. EMRI JULI HARNIS, M.T., Ph.D.
 NIP : 19670731 199403 1 004
 Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)
 Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Provinsi Riau

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama/NIM : **NURSAVINAH / 12070523092**
 b. Program Studi : Administrasi Negara
 c. Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melakukan kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Kerja Praktek di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai tanggal 15 Maret 2024 s.d. 15 Agustus 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 04 Juni 2024



Catatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di p@ffice.uin-suska-riau.ac.id dengan scan QR-Code



UIN SUSKA RIAU